

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kyai dan Jawara ditengah – tengah masyarakat Banten sejak dahulu menempati peran kepemimpinan yang sangat strategis. Sebagai seorang pemimpin, Kyai dan Jawara kerap dijadikan sebagai tempat untuk dimintakan pendapat terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat termasuk didalamnya dalam bidang politik. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji praktik dan pengaruh kepemimpinan Kyai dan Jawara pada pemilihan kepala daerah di Kota Serang, Propinsi Banten.

Kajian mengenai Kyai dan Jawara sudah dilakukan oleh beberapa peneliti baik mengenai Kyai dan Jawara yang diteliti secara terpisah maupun yang berusaha menemukan kaitan antara Kyai dan Jawara. Beberapa penelitian sebelumnya misalnya yang dilakukan oleh Tihami (1992) mengupas tentang agama, magi dan kepemimpinan Kyai dan Jawara dengan melakukan penelitian di sebuah desa di Banten.

Tihami (1992) mengungkapkan bahwa kedudukan kyai dan jawara dalam sistem sosial pada kenyataannya mendapat sumbangan dari magi dan agama. Agama yang menyebabkan lahirnya kepemimpinan kiyai dan jawara, berfungsi memperkuat kepemimpinan kyai dengan memberikan legitimasi. Pemberian legitimasi ini mengakibatkan kiyai dan jawara berada pada kepemimpinan agama dan masyarakat (kebudayaan) sebab agama juga menyediakan simbol-simbol kebudayaan. Sebagaimana agama memberikan legitimasi yang memperkuat kedudukan kyai dan jawara, demikian pula halnya dengan magi. Magi, menentukan munculnya kepemimpinan kyai dan jawara sebab dengan magi itu kyai dan jawara mempunyai kelebihan yaitu berupa “keluarbiasaan”.

Jadi agama, magi dan kepemimpinan dalam kyai dan jawara di Banten menurut kesimpulan Tihami (1992) terjalin dalam hubungan simbiotik (fungsi) dan sibernetik yang menjadikan kepemimpinan kyai dan jawara di Banten tetap lestari.

Penelitian yang dilakukan oleh Rivai (2003) menjelaskan bahwa budaya Jawara dan Kejawaraan sejak lama telah menjadi salah satu pola kepemimpinan informal dalam lingkungan masyarakat. Bersama – sama dengan kalangan formal dan informal lainnya, peran jawara semakin terlihat dalam berbagai bentuk khususnya dalam penempatan berbagai pejabat daerah. Hal ini disebabkan sebelumnya para pemimpin formal biasanya mendapatkan restu dari para jawara sebelum mereka menduduki jabatannya.

Konflik kepentingan ini menyebabkan para Jawara dengan leluasa mempengaruhi berbagai macam kebijakan pemerintahan dan implementasinya. Masuknya jawara untuk mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintahan menimbulkan kekhawatiran terjadinya pergeseran nilai-nilai luhur kejawaraan seperti sikap ksatria, berani dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran dalam menegakkan keadilan dikarenakan Jawara cenderung memakai budaya kekerasan. Budaya kekerasan ini kemudian dimanfaatkan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan untuk menghindari penolakan-penolakan dari masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kepemimpinan koersif Jawara dimanifestasikan dalam bentuk yang halus berupa tekanan-tekanan sampai dengan yang paling kasar berupa kekerasan. Namun berbagai tindakan negatif jawara sulit tersentuh dengan hukum karena adanya hubungan yang eksklusif dan tertutup antara jawara dan penguasa.

Penelitian yang dilakukan oleh Abrori (2003) mengkaji perilaku politik jawara Banten dalam proses politik di Banten. Abrori (2003) menyimpulkan bahwa secara umum perilaku politik jawara menggunakan pola perilaku pragmatis dimana upaya-upaya memperoleh dan mempertahankan dominasi adalah untuk mengejar nilai-nilai (values) dalam bentuk ekonomi yang ditunjukkan dengan adanya doktrin “Bela diri Bela Bangsa Bela Negara” yang dimaknai sebagai jihad untuk mendapatkan materi dan kepentingan pribadi. Doktrin ini pula dimaknai sebagai pendorong para jawara untuk bertindak sebagai pengaman Serang.

Abrori (2003) juga mengungkapkan bahwa budaya politik para jawara menggunakan pola *partisipan kaula*.¹ Sedangkan secara legitimasi, jawara mendapatkan legitimasi budaya dan legitimasi struktural. Legitimasi budaya diperoleh karena otoritas jawara diperoleh dari otoritas tradisional sedangkan legitimasi struktural diperoleh karena sebagian jawara masuk kedalam ranah struktural sehingga mereka pun akhirnya mendapatkan legitimasi struktural. Pola interaksi antara pemimpin dan pengikut pada jawara menggambarkan pola hubungan *patrimonial*.

Seiring demokratisasi yang terjadi pasca reformasi 1998, daerah – daerah baru terus bermunculan yang diperkuat dengan lahirnya UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah yang kemudian disempurnakan menjadi UU No 32 tahun 2004.

Salah satu daerah yang muncul dengan adanya peluang dari UU No 32 tahun 2004 ini yaitu lahirnya pemerintahan daerah Kota Serang yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Serang.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah memiliki hak – hak yang dijamin oleh undang – undang ini yaitu:

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

¹ Partisipan adalah untuk menggambarkan bentuk perilaku politik yang menyadari orientasi output dan in put yang mereka peroleh. Sementara kaula adalah untuk menggambarkan perilaku actor politik yang tidak menyadari out put dan in put yang mereka peroleh (Abrori, 2003)

Sebagai bagian dari Propinsi Banten, citra Kota Serang masih lekat dengan citra Banten pada umumnya yaitu sebagai daerah yang masih tertinggal meskipun pembangunan sudah berjalan sejak disahkan sebagai propinsi tersendiri. Dalam pengalaman pribadi penulis, ketika memperkenalkan diri sebagai orang Banten, maka yang sering muncul adalah gambaran Banten sebagai daerah jawara, tempat orang belajar ilmu kesaktian seperti ilmu kebal, ilmu pelet dan ilmu hitam lainnya. Banten juga lebih dikenal sebagai daerah tempat tinggal orang Baduy. Dalam citra yang sangat negatif, Banten digambarkan sebagai daerah dimana penduduknya masih banyak yang makan “*sekul aking*”.

Banten selama ini memang dikesankan oleh banyak orang sebagai daerah yang penuh dengan mistik, tertinggal dan “garang”. Hal ini mungkin terjalin erat dengan banyaknya jawara di daerah ini. Padahal jika dilihat dari sejarah panjangnya maka Banten seharusnya juga dikenal sebagai daerah religius karena pernah menjadi kerajaan islam yang sangat besar dan terkenal serta memiliki pesantren yang sangat banyak. Namun citra daerah jawara seperti ini lebih dikenal daripada daerah santri.

Citra sebagai daerah tertinggal dan sebagai daerah jawara dengan konotasi negatifnya menjadi pekerjaan rumah yang harus hadapi oleh setiap pemimpin di Banten. Falah (2006) mengutip pernyataan salah seorang tokoh Lebak menyatakan bahwa siapapun gubernur Banten akan senantiasa menghadapi dua hal yaitu pembangunan dan kejawaraan.

Rivai (2003) menerangkan bahwa sejalan dengan adanya otonomi daerah, partisipasi masyarakat pun diharapkan meningkat. Tugas penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berada pada beban pemerintah daerah seperti kepala daerah dan DPRD semata melainkan juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Dengan demikian keterlibatan masyarakat menjadi sedemikian pentingnya sehingga berbagai macam kebijakan dapat menyentuh rasa keadilan ditengah masyarakat. Hal ini juga membuka peluang bagi para pemimpin lokal untuk berpartisipasi lebih luas lagi dalam perkembangan dan pembangunan daerah.

Para pemimpin lokal seperti Kyai dan Jawara dapat berperan sebagai pembuat kebijakan di pemerintahan yang baru maupun sebagai pihak yang mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintahan.

Peran keduanya masih terlihat pada saat Propinsi Banten pertamakali hendak didirikan dimana para Kyai (Ulama) dan Jawara turut mengerahkan masa untuk mendukung pembentukan Propinsi Banten. Sebelumnya, di era orde baru, dari catatan Sudiarti dalam thesis Ahmad Abrori (2003), para Kyai dan Jawara berperan dalam kemenangan salah satu partai politik dengan melakukan proses sosialisasi melalui pengajian – pengajian.

Masuknya pengaruh Kyai dan Jawara dalam berbagai kebijakan publik merupakan konsekuensi dari kedudukan mereka sebagai kelompok kepentingan yang dijelaskan oleh Winarno (2007) bahwa disamping para pembuat kebijakan yang resmi, didalam proses perumusan kebijakan terdapat partisipasi kelompok-kelompok tidak resmi yang salah satunya adalah kelompok kepentingan. Mereka disebut pemeran serta tidak resmi dalam perumusan kebijakan karena mereka tidak memiliki kewenangan yang sah untuk membuat keputusan yang mengikat tetapi mereka terlibat aktif dalam perumusan kebijakan.²

Winarno (2007) menjelaskan bahwa, peran serta kelompok kepentingan akan lebih meningkat pada sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini terjadi karena dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat dilindungi serta warga Negara lebih mempunyai keterlibatan dalam politik.³

Pengaruh kelompok kepentingan terhadap keputusan kebijakan salah satunya tergantung pada kecakapan dari orang yang memimpin kelompok tersebut. Dengan demikian, pengaruh seorang pemimpin, dalam hal ini Kyai dan Jawara, akan menentukan seberapa kuat kelompoknya dalam mempengaruhi berbagai kebijakan publik.

“Pengaruh kelompok kepentingan terhadap keputusan kebijakan tergantung pada berapa banyak factor yang menyangkut ukuran-ukuran

² Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses, MediaPressindo, Yogyakarta, 2007 hal 128

³ ibid

keanggotaan kelompok, keuangan dan sumber-sumber lain, kepaduannya, kecakapan dari orang yang memimpin kelompok tersebut, ada tidaknya persaingan organisasi, tingkah laku para pejabat pemerintah dan tempat pembuatan keputusan dalam sistem politik”.⁴

Keterlibatan Kyai dan Jawara dalam berbagai dinamika masyarakat juga dirasakan ketika pemilihan kepala daerah kota Serang diadakan. Tokoh-tokoh Kyai dan Jawara diyakini terlibat dalam pilkada. Terbukti dari adanya hubungan para calon walikota dan calon wakil walikota dengan kelompok Kyai dan Jawara.

Suhadi (2008) mengatakan bahwa ada benang merah yang menggambarkan situasi perpolitikan di Banten yaitu dengan hadirnya dominasi empat sub kultur yang ada di Banten yaitu jawara (pendekar), ulama (Kyai), cendekiawan dan pengusaha. Dari empat sub kultur itu, dominasi jawara dan ulama terlihat lebih menonjol. Lebih jauh Aris berpendapat bahwa, sulit bagi seseorang yang ingin menjadi kepala daerah tanpa menggandeng jawara dan ulama. Bahkan pengaruh jawara dan ulama sering mengalahkan peran partai politik dalam member warna politik local di Banten.⁵

Tihami (2008) juga berpendapat bahwa bakal calon kepala daerah harus mendapatkan legitimasi dari Jawara dan ulama mengingat kedudukan mereka sebagai figur-figur sentral di Banten.⁶

Kota Serang mengadakan pemilihan kepala daerah pertamanya pada tahun 2008 yang dipilih langsung oleh masyarakatnya. Pemilihan kepala daerah secara langsung di Kota Serang ini menjadi pemilihan kepala daerah pertama dimana calon independen secara resmi boleh ikut sebagai calon walikota dan calon wakil walikota.

Dengan pendidikan yang memungkinkan masyarakatnya hidup lebih modern dan berpikir rasional, maka pengaruh kepemimpinan Kyai

⁴ ibid

⁵ Bayang-bayang jawara dan ulama dalam pilkada langsung di banten, <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0501/15/daerah/1500855.htm>, diakses 30 April 2009 jam 06:01

⁶ ibid

dan Jawara di Kota Serang sangat mungkin untuk berubah ditambah lagi dengan dinamika demokrasi di Indonesia yang memungkinkan hadirnya banyak partai dan ikut sertanya calon independen dalam pemilihan kepala daerah.

Dengan latar belakang tersebut, maka praktik dan pengaruh kepemimpinan Kyai dan Jawara dalam Pilkada Kota Serang menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih dalam sehingga kepemimpinan kyai dan Jawara dapat terlihat eksistensinya pada masyarakat disaat pemilihan kepala daerah dilaksanakan.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian mengenai Kyai dan Jawara memang sudah mulai banyak dilakukan, namun penelitian ini berusaha menggali lebih dalam mengenai Kyai dan Jawara dalam hal praktik dan pengaruh kepemimpinannya. Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah praktik dan pengaruh kepemimpinan Kyai dalam PILKADA Kota Serang
2. Bagaimanakah praktik dan pengaruh kepemimpinan Jawara dalam PILKADA Kota Serang

1.3 Tujuan Penelitian

Para peneliti sebelumnya yang melakukan kajian terhadap Kyai dan Jawara, dilakukan sebelum terbentuknya Kota Serang dan sebelum terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan dimana seorang kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakatnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai:

1. Praktik dan pengaruh kepemimpinan Kyai dalam pemilihan kepala daerah Kota Serang
2. Praktik dan pengaruh kepemimpinan Jawara dalam pemilihan kepala daerah Kota Serang

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan studi dan kajian kepemimpinan terutama tentang praktik kepemimpinan kyai dan jawara dalam pemilihan kepala daerah
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pengelola pemerintahan untuk mewujudkan sinergitas antara pemimpin formal dan informal dalam mewujudkan berbagai macam tujuan yang menjadi semangat diberlakukannya otonomi daerah

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini berusaha mengkaji mengenai praktik kepemimpinan Kyai dan Jawara sehingga bahasan penelitian ini lebih difokuskan untuk mengetahui bagaimana kyai dan jawara sebagai pemimpin menjalankan peranya dalam pemilihan kepala daerah Kota Serang.

Praktik kepemimpinan dalam penelitian ini adalah cara-cara yang diterapkan oleh Kyai dalam mempengaruhi para pengikutnya sementara pengaruh kepemimpinan merupakan dampak yang timbul kepada para pengikutnya dari adanya praktik kepemimpinan yang dijalankan oleh Kyai dan Jawara.

Penelitian ini tidak masuk kedalam wilayah penilaian benar dan salah terhadap perilaku kyai dan jawara maupun terhadap keputusan politik kyai dan jawara dalam mendukung atau tidak mendukung pilihan-pilihan politik mereka.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Penulis mencoba melakukan tinjauan literatur pada bab ini dengan dasar teoritik yang disusun meliputi berbagai konsep terkait peran, kepemimpinan, otonomi daerah, kyai dan jawara. Juga akan mencoba menguraikan secara ringkas mengenai gambaran lokasi penelitian mulai dari sejarah hingga perkembangannya terkait dengan objek penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti meliputi pendekatan penelitian, data dan sumber data dalam penelitian, pengolahan data dan tahapan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Temuan-temuan yang didapatkan dalam pengumpulan data akan coba dianalisa dengan terlebih dahulu menetapkan batas-batas penelitian, mengumpulkan informasi melalui pengamatan wawancara, dokumen dan bahan-bahan visual dari informan. Kemudian data dianalisa dengan membuktikan keabsahan data yakni membandingkan jawaban seorang informan dengan informan lainnya terkait dengan permasalahan yang sama dan dicocokkan dengan hipotesis penelitian.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab VI dibagi menjadi 2 (dua) Sub Bab yakni *pertama*, Kesimpulan yang berisi kesimpulan mengenai analisa permasalahan yang telah dituangkan pada pertanyaan penelitian ini dan kemudian diakhiri dengan Sub Bab *kedua* yang berisi saran dan rekomendasi dari penelitian ini.